

LAPORAN KINERJA (LKJ) DINAS PERTANIAN KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2024





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Pesisir Selatan, 26 Februari 2025
Inspektur

Hellen Hasmeita Sari,S.E.,Ak.,M.Ec.Dev
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19780528 200501 2 004

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yang menjadi bagian akhir dari perjalanan panjang RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan harus mampu menjawab target yang telah ditetapkan serta menjawab berbagai dinamika yang terjadi. Dalam rangka merespon tantangan dan dinamika global seperti tantangan klasik sektor pertanian, dampak perubahan iklim, tekanan geopolitik dunia, pembatasan distribusi dan tantangan perdagangan dunia, maka Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan harus cepat dan tanggap menyusun strategi untuk mengamankan pangan nasional dan pertumbuhan perekonomian khususnya sektor pertanian.

LKj tidak hanya menjelaskan keberhasilan pembangunan pertanian, namun juga memberikan penjelasan terkait tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya perbaikan dan perhatian serius untuk pencapaian target pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap, kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang akan datang dapat lebih baik dan ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang optimal, serta mengatasi permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2024 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan serta dukungan pemangku kepentingan



mulai dari tingkat Pusat dan Daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, Akademisi dan tidak lupa yang terpenting peran Petani. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Besar harapan kami, Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dan dapat memberikan manfaat serta menjadi umpan balik (feedback) bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Demikian LKj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, terima kasih.

Paman, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Pertanian,

MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009



IKHTISAR EXECUTIVE

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi dan APBN) Tahun Anggaran 2024 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (*good governace*).

Penyusunan LKj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi ketiga. Misi pertama yaitu **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan** dan misi ketiga yaitu **“Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah”**.

Seiring dengan harapan tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Pertanian Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

VISI : **Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional**

MISI 1 : **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**

TUJUAN 1.1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

SASARAN 1.1.1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

MISI 3 : **Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah**

TUJUAN 3.1 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan

SASARAN 3.1.2 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

SASARAN 3.1.4 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka untuk mewujudkan itu semua ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada Tabel. 1 berikut :

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja 2024		
					Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	A (89,53)	A (88,92)*	99,32
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	100	90	90,00
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliyun	3,10	3,05*	98,39
Rata-rata capaian (%)							95,90

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi serta mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa yang akan datang semua capaian sasaran strategis dapat lebih maksimal.



Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien pada tahun berikutnya serta sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan,



MADRIANTO, S.Hut., M.H.

NIP. 8780519 200501 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA.....	3
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA.....	8
1.5 LANDASAN HUKUM.....	19
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016- 2021..	24
2.2 RENCANA KINERJA.....	28
2.3 PERJANJIAN KINERJA.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA.....	33
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	34
3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	35
3.4 REALISASI ANGGARAN.....	78
BAB IV PENUTUP	84
4.1 KESIMPULAN.....	84
4.2 SARAN.....	85
DAFTAR LAMPIRAN.....	86
PENGHARGAAN YANG DITERIMA.....	87



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024..... v
Tabel 1.1	Komposisi Aparatur pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin..... 4
Tabel 1.2	Komposisi Jumlah Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan. 6
Tabel 2.1	Rasionalisasi Target Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026..... 27
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026..... 28
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024..... 30
Tabel 2.4	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan..... 30
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024..... 31
Tabel 2.6	Program dan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024..... 32
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024..... 34
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024..... 34
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024..... 36
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir..... 37
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi..... 37
Tabel 3.6	Perbandingan Nilai Sakip Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024... 38
Tabel 3.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 47
Tabel 3.8	Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2024..... 52



Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	54
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	54
Tabel 3.11	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	55
Tabel 3.12	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	56
Tabel 3.13	Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Tahun 2024.....	57
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	58
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	59
Tabel 3.16	Perbandingan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024.....	60
Tabel 3.17	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	61
Tabel 3,18	Capaian Produksi Pertanian Tahun 2022 s.d Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan.....	61
Tabel 3.19	Luas Lahan Sawah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024....	62
Tabel 3.20	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	75
Tabel 3.21	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 yang Menunjang Sasaran Strategis.....	79



DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 1.1	Komposisi Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Grafik 1.2	Komposisi Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan..	6
Grafik 3.1	Perbandingan Capaian PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dengan PDRB Sektor Pertanian Tahun 2022 s.d Tahun 2024.....	58

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	7
Gambar 3.1 Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.....	39
Gambar 3.2 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.....	39
Gambar 3.3 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Secara Berkala Pada Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan Selama Tahun 2024.....	40
Gambar 3.4 Pemberian Reward dan Punishment Terhadap Capaian Kinerja Bawahan yang meliputi Peringkat Terbaik I, II dan III dan Peringkat I, II dan III Terbawah.....	41
Gambar 3.5 Pemberian Reward dan Punishment kepada Capaian Kinerja Perangkat Daerah oleh Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan.....	42
Gambar 3.6 Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi.....	43
Gambar 3.7 Dokumen LKj dan Laporan Hasil Evaluasi LKj Tahun 2023.....	43
Gambar 3.8 Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.....	44
Gambar 3.9 Youtube Dinas Pertanian.....	45
Gambar 3.10 Facebook Dinas Pertanian.....	45
Gambar 3.11 Instagram Dinas Pertanian.....	45
Gambar 3.12 Tiktok Dinas Pertanian.....	46
Gambar 3.13 Piagam Penghargaan Terbaik I Kategori Perangkat Daerah dengan kualifikasi “Informatif” dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	46
Gambar 3.14 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023.....	47
Gambar 3.15 Tindak Lanjuti Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pertanian Tahun 2023.....	49
Gambar 3.16 Hasil Penilaian Inovasi Tahun 2023.....	52
Gambar 3.17 Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2024.....	53

Gambar 3.18	Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).....	63
Gambar 3.19	Contoh Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Pertanian...	64
Gambar 3.20	Penyaluran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	67
Gambar 3.21	Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian ke Kelompok Tani.....	67
Gambar 3.22	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahun 2024.....	68
Gambar 3.23	Penyaluran pompa air ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan.....	69
Gambar 3.24	Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit (SL-PHT) Tahun 2024.....	69
Gambar 3.25	Penanaman sistem Jajar Legowo 2:1 (sebelah kiri) dan Jajar Legowo 3:1 (sebelah kanan).....	70
Gambar 3.26	Pemangkasan tanaman upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman.....	71
Gambar 3.27	Pemantauan luas tanam padi sawah menggunakan drone.....	72
Gambar 3.28	Pendidikan dan pelatihan petugas dan kelompok tani Tahun 2024.....	73
Gambar 3.29	Aktivitas peningkatan populasi ternak unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) oleh Inseminator Tahun 2024...	74
Gambar 3.30	Penyaluran ternak ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	74

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LKj) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan LKj atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, hingga entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat

kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang pertanian yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran Tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan LKj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja: bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2024.
2. Aspek Manajemen Kinerja: bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jalan Diponegoro Painan Kecamatan IV. Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Gedung perkantoran utama dengan kondisi yang baik dan fasilitas yang masih kurang lengkap. Adapun gedung kantor Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di 15 (lima belas) dan 7 gedung Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan banyak yang rusak ringan, sedang dan berat.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu pimpinan daerah mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, prasarana sarana pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan bidang penyuluhan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pertanian; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Bidang Perkebunan;
4. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;

5. Bidang Peternakan;
6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
7. Bidang Penyuluhan Pertanian; dan
8. UPTD.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, dimana jumlah total ASN dan Non ASN per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 278 orang yang terdiri atas :

- a. PNS sebanyak 105 orang yang terdiri atas 52 orang laki-laki dan 53 orang perempuan;
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 51 orang yang terdiri atas 28 orang laki-laki dan 23 orang perempuan; dan
- c. Non PNS sebanyak 122 orang yang terdiri atas 49 orang laki-laki dan 73 orang perempuan.

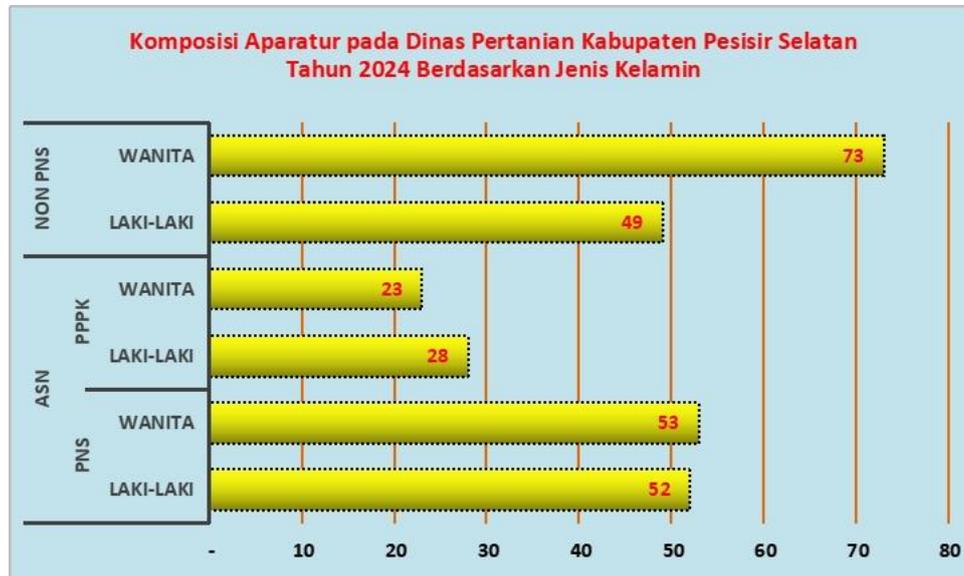
Secara terinci jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pertanian pada Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tergambar pada Tabel 1.1 dan Grafik 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Aparatur pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	ASN						Non ASN			Total
	PNS			PPPK			Laki-Laki	Wanita	Jumlah	
	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Laki-Laki	Wanita	Jumlah				
2024	52	53	105	28	23	51	49	73	122	278
Jumlah	52	53	105	28	23	51	49	73	122	278

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Grafik 1.1
Komposisi Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025, diolah

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- PNS dengan jenjang pendidikan pendidikan S2 sebanyak 11 orang, jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 69 orang mendominasi jenjang pendidikan sumber daya manusia, pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 6 orang, SMA sebanyak 19 orang;
- PPPK dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 16 orang, jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 4 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 30 orang mendominasi jenjang pendidikan Sumber Daya Manusia; dan
- Non PNS jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 77 orang, jenjang pendidikan D1/DII/DIII sebanyak 5 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 34 orang, jenjang pendidikan SMP sebanyak 4 orang dan jenjang pendidikan SD sebanyak 2 orang.

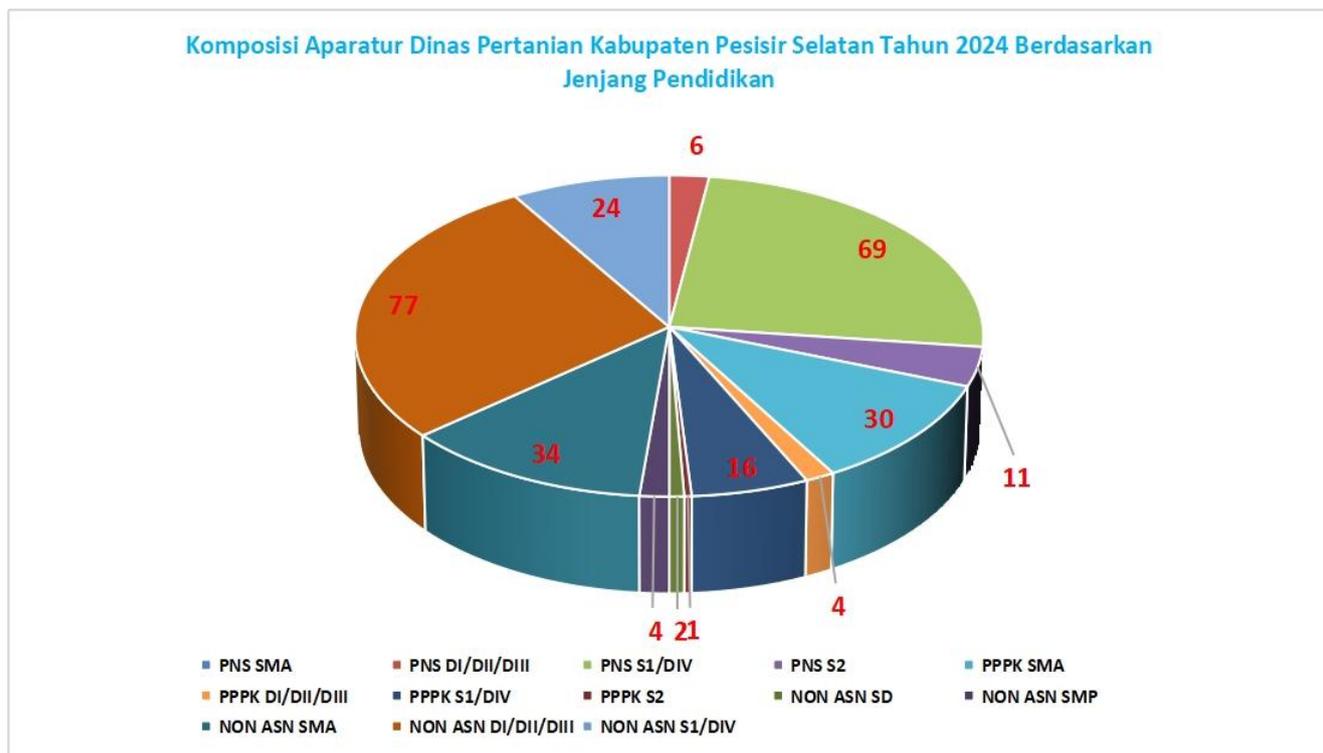
Dari data di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan sumber daya manusia Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan Grafik 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Jumlah Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tahun	ASN										Non ASN						Total
	PNS					PPPK					Non ASN						
	SMA	DI/ DII/ DIII	S1/ DIV	S2	Jumlah	SMA	DI/ DII/ DIII	S1/ DIV	S2	Jumlah	SD	SMP	SMA	DI/ DII/ DIII	S1/ DIV	Jumlah	
2024	19	6	69	11	105	30	4	16	1	51	2	4	34	5	77	122	278
Jumlah	19	6	69	11	105	30	4	16	1	51	2	4	34	5	77	122	278

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025, diolah

Grafik 1.2
Komposisi Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

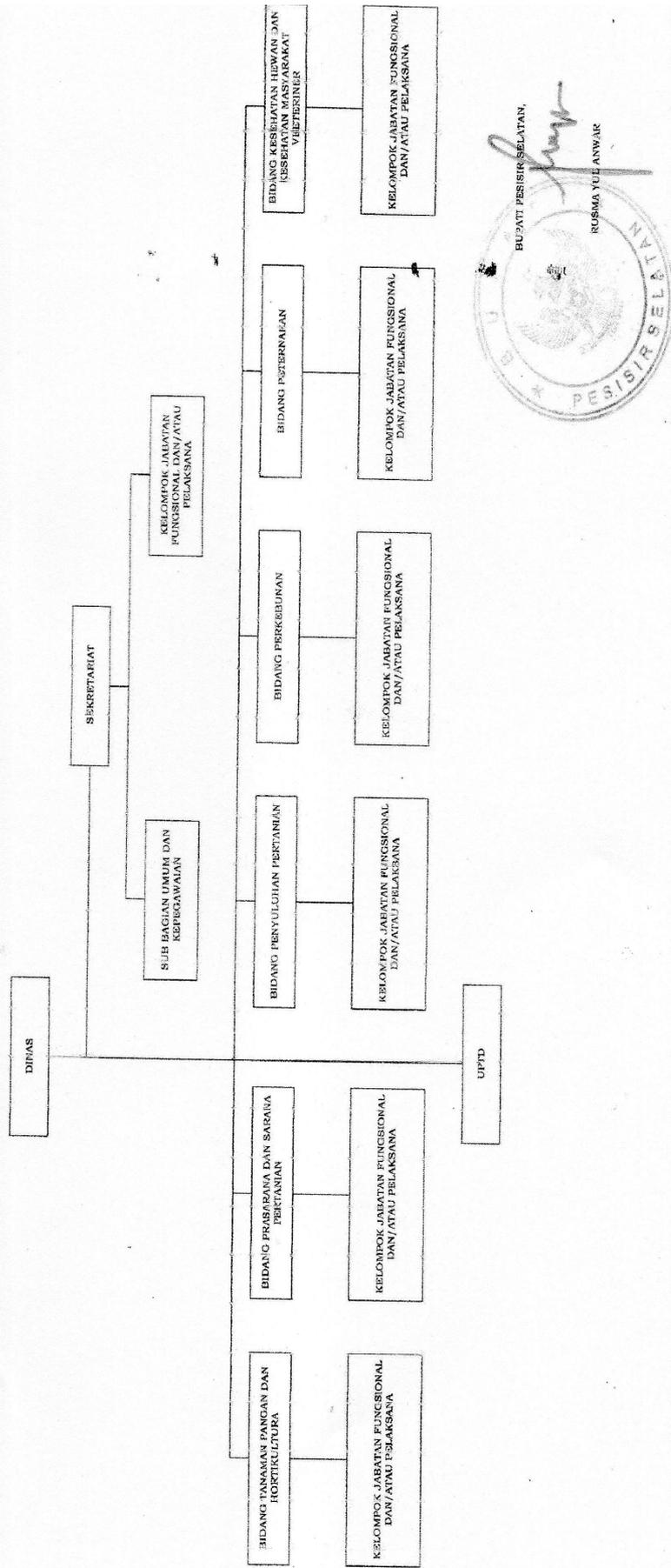


Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025, diolah

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Pembangunan pertanian secara umum memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi: peningkatan ketahanan pangan, produk domestik regional bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional. Permasalahan pembangunan pertanian merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan pertanian yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat ini. Dalam rangka melaksanakan kegiatan strategis/prioritas, maka perlu diperhatikan aspek-aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Merujuk pada identifikasi permasalahan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ada beberapa permasalahan dalam pembangunan sektor pertanian sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi. Dalam praktiknya, pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama untuk membicarakan berbagai permasalahan yang dihadapi bersama serta sekaligus merencanakan bersama pula mengenai sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa yang akan datang.

2. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani/peternak.

Pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan di Pesisir Selatan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha guna meningkatkan daya saing serta meningkatkan pendapatan petani/peternak. Untuk itu, perlu adanya strategi dan kebijakan sebagai kerangka pembangunan Pertanian di Pesisir Selatan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan.

3. Belum Optimalnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman.
Pesisir Selatan memiliki sumber daya genetik berupa plasma nutfah Padi Sawah varietas Bawaan, Jengkol Bareh dan Lokan Pessel, Sapi Pesisir dan Itik Bayang. Namun belum diusahakan secara optimal karena Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman.

4. Masih Rendahnya Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Penggunaan benih bersertifikat dan penerapan teknologi sangat berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil tanaman. Pemakaian benih bersertifikat di Pesisir Selatan masih sangat rendah, untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil sebagaimana yang diharapkan. Perlu optimalisasi prasarana dan sarana, pengawasan, pengembangan kelembagaan, penataan alur distribusi dan sosialisasi penggunaan benih bersertifikat.

5. Belum terpenuhinya kebutuhan benih ternak unggul.

Sebagian besar benih ternak unggul berupa frozen semen untuk Inseminasi Buatan (IB) didatangkan dari luar daerah, yaitu di BIB Limbukan Tuah Sakato Payakumbuh, BIB Lembang Bandung, BIB Singo Sari Jawa Tengah. Jumlah aseptor IB 9.000 ekor per tahun di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jumlah tersebut dibutuhkan 12.000 dosis frozen semen. sedangkan rata-rata pengadaan frozen semen sumber dana APBD Kabupaten sebanyak 2.000 dosis setiap tahun dan Bantuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat rata-rata 8.000 dosis setiap tahun, dengan demikian terdapat kekurangan frozen semen sekitar 2.000 dosis per tahun.

6. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian.

a) Prasarana.

Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian dengan basis teknologi modern menjadi kunci sukses dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun berbagai permasalahan yang kerap ditemui terkait



lahan pertanian antara lain tingkat kesuburan lahan yang masih rendah di beberapa tempat, Masih adanya alih fungsi lahan pertanian produktif ke sektor lain seperti perumahan, pabrik, jalan, tempat wisata, dan fasilitas umum lainnya. Masih diperlukannya penambahan luas lahan sawah bagi usaha budidaya tanaman padi guna mendukung swasembada padi, Optimasi lahan – lahan terlantar sehingga lebih produktif bagi budidaya pertanian seperti optimasi lahan rawa dan lahan kering.

Air merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam budidaya pertanian. Tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal. Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi dimana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini menyebabkan intensitas tanaman menjadi terbatas pada setiap tahunnya. Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budidaya tanaman berjalan tidak optimal. Dilain pihak pertumbuhan penduduk semakin meningkat menuntut peningkatan ketersediaan bahan pangan.

Pembiayaan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Namun demikian aksesibilitas petani/peternak terhadap pembiayaan merupakan masalah utama yang sering dikeluhkan oleh petani/peternak. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang

berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani/peternak. Di sisi lain lembaga pembiayaan masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko (high risk), tergantung musim dan jaminan harga yang tidak pasti.

Meskipun skema pembiayaan usaha pertanian telah tersedia tetapi kondisi masyarakat petani/peternak masih dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani/peternak yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani/peternak untuk menambah permodalan melalui lembaga pembiayaan dan investasi. Pemerintah telah memberi berbagai fasilitas pembiayaan untuk memudahkan petani/peternak untuk mengakses permodalan untuk usaha taninya. Namun dalam implementasinya petani/peternak masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya realisasi penyaluran KUR untuk sektor pertanian.

b) Sarana.

Penggunaan alat mesin pertanian harus kita lakukan untuk mempercepat pengolahan tanah dan panen sehingga berdampak terhadap peningkatan indeks pertanaman dan produksi. Optimalisasi pemanfaatan alsintan juga dapat dilakukan melalui kegiatan Brigade Alsintan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disamping itu juga mengurangi biaya produksi, mengimbangi semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian serta dapat meningkatkan mutu hasil pertanian.

Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi. Permasalahan yang selalu muncul adalah ketersediaan pupuk yang masih belum sesuai dengan kebutuhan petani, hal ini disebabkan alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam e-RDKK serta pupuk bersubsidi tidak tersedia saat dibutuhkan. Selain itu pemberian pupuk bersubsidi yang belum

menerapkan Prinsip 6 Tepat yaitu Tepat jenis, Tepat dosis/jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, Tepat tempat, dan Tepat mutu sehingga akan berdampak negatif pada kesuburan lahan, perkembangan organisme pengganggu tanaman yang pada akhirnya akan menurunkan produktifitas dan produksi hasil pertanian.

Untuk pemecahan masalah ini perlu dilakukan berbagai upaya antara lain penambahan alokasi pupuk bersubsidi, meningkatkan pendampingan kelompok tani oleh Penyuluh Pertanian dalam penyusunan e-RDKK, pengembangan dan pemakaian pupuk organik, meningkatkan koordinasi antara kabupaten/kota dengan produsen, distributor dan pengecer agar penyaluran pupuk bersubsidi tersedia saat dibutuhkan oleh petani, meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

7. Belum Optimalnya Peningkatan Produktivitas Pertanian.

Produktivitas adalah rasio antara input dan output dari suatu proses produksi dalam periode tertentu. Produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh input dan output dari pertanian. Input dari pertanian meliputi tenaga kerja, lahan pertanian, teknologi, dan modal, sedangkan output dari pertanian meliputi hasil pertanian yang dikelola. Selain itu produktivitas di bidang pertanian juga tidak lepas dari faktor-faktor sosial ekonomi yang ada disekitarnya.

Faktor ekonomi dalam hal ini meliputi pemanfaatan teknologi melalui penggunaan benih/bibit, penggunaan pupuk, penggunaan pakan, penggunaan pestisida serta peralatan pertanian yang digunakan. Pemanfaatan teknologi ini harus diseimbangkan dengan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia karena SDM merupakan komponen penting dalam peningkatan produksi.

Faktor sosial yang mempengaruhi produktivitas di bidang pertanian meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bertani. Rendahnya tingkat pendidikan disinyalir merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas petani/peternak. Selain itu pengalaman bertani akan

membantu para petani/peternak mengambil keputusan dalam melakukan usaha tani. Semakin lama pengalaman bertani yang dimiliki oleh petani maka cenderung memiliki keterampilan tertinggi.

Perlu pengelolaan input dan output dari pertanian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian. Peningkatan produktivitas ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak dampak positif, baik kepada para petani/peternak untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/peternak maupun pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

8. Keterbatasan Ketersediaan Infrastruktur serta Sarana Prasarana Lahan dan Air.

Lahan dan air merupakan faktor produksi utama pertanian, keberadaan dan berfungsinya infrastruktur lahan dan air merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian khususnya padi, salah satu program yang harus dilaksanakan adalah rehabilitasi jaringan irigasi. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Pengelolaan irigasi harus memenuhi syarat kewenangan, diharapkan pada kesempatan ini seluruh stake holder terkait baik BWSS V, Provinsi dan Kecamatan dapat berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemecahan permasalahan terhadap kinerja sistem irigasi yang ada terutama pada kewenangan kabupaten kota yang merupakan daerah irigasi dengan jumlah dan luas yang paling besar sehingga kedepan masalah rehabilitasi jaringan irigasi tersebut dapat kita cari solusinya.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah embung, dam parit, jalan usahatani, jalan dan produksi. Tantangan yang harus dihadapi ke depan

adalah mengenai penyediaan semua prasarana yang dibutuhkan petani tersebut secara memadai untuk menekan biaya produksi yang tinggi akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian.

9. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan.

Keberhasilan penyuluhan pertanian dalam penyampaian informasi teknologi kepada petani/peternak dan kelompok tani di lapangan selain SDM yang memadai juga dipengaruhi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan terutama yang berada di tingkat kecamatan. Secara umum saat ini kondisi sarana dan prasarana penunjang penyuluhan di Kabupaten Pesisir Selatan masih kurang.

10. Masih Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Petani, Peternak dan Petugas.

SDM pertanian merupakan pendukung utama dalam keberhasilan pembangunan pertanian itu sendiri sehingga langkah yang dilakukan adalah kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kemandirian petani/peternak dan kelompok tani dalam berusaha tani dan peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh/petugas.

Pendidikan dan usia petani/peternak menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani/peternak yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan petani ini berdampak terhadap keterbatasan dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan oleh petani. Dari sisi usia petani, petani berusia tua (lebih dari 55 tahun) jumlahnya semakin meningkat, sementara tenaga kerja usia muda semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian.

11. Terbatasnya jumlah Petugas dengan rincian sebagai berikut :

- Pesisir Selatan masih kekurangan sekitar 98 orang penyuluh, idealnya 1 orang penyuluh 1 nagari. Jumlah penyuluh yang ada di Pesisir

Selatan saat ini baru mencapai 84 orang termasuk yang merangkap menjadi Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Penyuluh Pertanian Supervisor (PP Supervisor), sedangkan jumlah nagari di Pesisir Selatan sebanyak 182.

- Tenaga Medik Veteriner sebanyak 9 (sembilan), secara teknis, kebutuhan tenaga medik veteriner untuk mengelola 7 (tujuh) unit puskesmas, 2 (dua) unit perbibitan, 1 (satu) unit Pasar Ternak dan 1 (satu) unit Tempat Pematangan Hewan dibutuhkan tenaga medis veteriner (Dokter hewan) sebanyak 14 orang.
- Tenaga Paramedik Veteriner/Inseminator sebanyak 14 orang, dengan luasnya wilayah jangkauan IB dan potensi akseptor sebanyak 26.000 ekor dibutuhkan Paramedik Veteriner/Inseminator sebanyak 35 orang atau masih kurang 21 orang.

12. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Kapasitas Kelembagaan Tani.

Salah satu strategi dalam menggerakkan petani/peternak dalam pembangunan pertanian adalah melalui pemberdayaan kelembagaan tani. Kelembagaan tani berperan sebagai jembatan antara petani dan pemerintah serta dapat menjadi wadah advokasi dan penyampaian aspirasi petani/peternak. Kelembagaan tani yang kuat dan mandiri dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani/peternak. Namun pada saat ini kelembagaan petani belum kuat dan mandiri, sehingga belum dapat berperan secara optimal sebagai mitra pemerintah dan penyalur aspirasi petani/peternak.

13. Berkurangnya Lahan Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan.

Keberlanjutan sektor pertanian dihadapkan pada ancaman penurunan luas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian produktif ke non pertanian yang terjadi secara massif. Pembangunan sektor non pertanian serta kebutuhan masyarakat atas ruang dan pemukiman serta sarana prasarana lainnya menyebabkan terjadinya penyusutan lahan pertanian. Disisi lain upaya perlindungan lahan melalui Undang-undang

Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) belum efektif dalam pengendalian terhadap alih fungsi lahan.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan yang tidak hanya menyebabkan produksi turun, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian.

14. Dampak Perubahan Iklim dan Serangan OPT serta serangan penyakit hewan Terhadap Peningkatan Produksi Pertanian.

Perubahan iklim global merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petani/peternak. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani/peternak dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani/peternak dalam melakukan antisipasi dan

mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Sedangkan untuk kasus penyakit hewan yaitu perlu tersedianya vaksin dan obat-obatan hewan sesuai kebutuhan serta pengetahuan masyarakat tentang higienis dan sanitasi kandang.

15. Rendahnya Akselerasi Pemanfaatan Inovasi Teknologi untuk Hilirisasi Pertanian.

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih lemah karena lambatnya diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (innovation) di tingkat petani/peternak. Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal. Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, sistem penyampaian hasil teknologi dilakukan oleh penyuluh melalui proses aplikasi teknologi di area percontohan.

Pada era desentralisasi, kegiatan penyuluhan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan permasalahan pada sistem penyampaian teknologi menjadi lebih kompleks akibat kurangnya perhatian pemerintah daerah pada fungsi penyuluhan pertanian. Hubungan keterkaitan antara peneliti, penyuluh, dan petani/peternak dinilai masih lemah. Oleh karena itu perlu adanya penataan kembali fokus dan prioritas penelitian serta sistem diseminasi yang mampu menjawab permasalahan petani disertai dengan revitalisasi penyuluhan pertanian, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi petani.

16. Masih Tingginya Tingkat Kehilangan Hasil Dalam Proses Produksi, Panen dan Pasca Panen.

Upaya peningkatan produktivitas tidak akan berhasil jika tidak diiringi dengan upaya penekanan kehilangan hasil. Dalam proses produksi, panen dan pasca panen serta pengolahan hasil terjadi kehilangan hasil yang cukup tinggi (10,09%). Kehilangan hasil ini mulai dari penurunan kualitas sampai komoditas tersebut tidak layak pasar (not marketable) atau tidak

layak dikonsumsi. Penanganan pasca panen yang baik akan menekan kehilangan (losses), baik dalam kualitas maupun kuantitas.

17. Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian.

Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan petani/peternak adalah melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian. Namun pada saat ini peningkatan nilai tambah produk pertanian masih rendah. Rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian disebabkan oleh belum tersedianya peralatan yang memadai dan penguasaan teknologi oleh petani.

18. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Pakan Alternatif untuk Pakan unggas dan pakan hijauan.

Peternak bisa menggunakan pakan unggas dari sumber daya alam dan limbah pertanian untuk memenuhi kadar nutrisi sebagaimana standar pakan unggas dengan formulasi ransum yang tepat, namun penerapan ini belum optimal.

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Peningkatan pendapatan petani/peternak;
3. Optimalisasi pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman;
4. Produksi benih padi sawah bersertifikat;
5. Peningkatan penggunaan benih bersertifikat;
6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian;
7. Penerapan Sekolah Lapang GAP (Good Agriculture Practice), Sekolah Lapang PHT (Pengendalian Hama Terpadu), Sekolah Lapang Iklim (SLI), Sekolah Lapang GHP (Good Handling Practice), Sekolah Lapang GBP (Good Breeding Practice);
8. Optimalisasi peningkatan produktivitas pertanian;
9. Peningkatan ketersediaan air irigasi;

10. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan;
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM petugas dan petani/peternak;
12. Penekanan alih fungsi lahan dan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian;
13. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI), pengendalian OPT dan Serangan penyakit hewan;
14. Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi untuk hilirisasi pertanian;
15. Menekan proporsi kehilangan hasil dalam proses produksi, panen dan pasca panen; dan
16. Optimalisasi nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

1.5. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 – 2026;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan; dan
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pada sub bab ini disajikan klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Pada sub bab ini disajikan analisa capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”**.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

- SEJAHTERA** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
- MAJU** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung

sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.

BERMARTABAT : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)

AKUNTABEL : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

PROFESIONAL : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

2.1.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
- 3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;

- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
- 5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan
- 6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Berdasarkan keenam misi tersebut, dapat dilihat bahwa Misi Kesatu dan Misi Ketiga berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, yakni :

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan; dan
- 2) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Pada Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kajian Rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026. Kajian yang dilakukan adalah mereviu penggunaan indikator utama dan indikator kinerja perangkat daerah terhadap RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan yang dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026. Selanjutnya melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 050/0034/PPEPD-Bapedalitbang/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Rasionalisasi Target Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan penyusunan pohon kinerja Perangkat Daerah, rasionalisasi Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2021-2026. Dari hasil rasionalisasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Rasionalisasi Target Kinerja Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja											
			Sebelum Rasionalisasi						Setelah Rasionalisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian	-	-	65 (B)	66 (B)	67 (B)	68 (B)	-	-	-	-	-	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	88,20 (A)	88,64 (A)	89,09 (A)	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)	88,20 (A)	88,64 (A)	89,09 (A)	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	-	85	100	100	100	100	-	85	100	100	100	100	
	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Rp. 2,90 Trilyun	Rp. 2,98 Trilyun	Rp. 3,04 Trilyun	Rp. 3,10 Trilyun	Rp. 3,16 Trilyun	Rp. 3,23 Trilyun	Rp. 2,90 Trilyun	Rp. 2,98 Trilyun	Rp. 3,04 Trilyun	Rp. 3,10 Trilyun	Rp. 3,16 Trilyun	Rp. 3,23 Trilyun	

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dilakukan rasionalisasi, karena nilai reformasi birokrasi hanya pada tingkat pemerintah daerah atau Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan hasil rasionalisasi maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan (Akhir Renstra)	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Nilai Tukar Petani (NTP)	109,29	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	88,20 (A)	88,64 (A)	89,09 (A)	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)
				Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	-	85	100	100	100	100
				Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Rp. 2,90 Triliyun	Rp. 2,98 Triliyun	Rp. 3,04 Triliyun	Rp. 3,10 Triliyun	Rp. 3,16 Triliyun	Rp. 3,23 Triliyun

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

2.2. RENCANA KINERJA

Kinerja memerlukan ukuran sehingga yang dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap standar atau target yang direncanakan. Ukurannya menggunakan indikator yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja yang baik memenuhi unsur spesifik (**S**pecific), terukur (**M**easurable), dapat dicapai secara rasional (**A**chievable), relevan dengan kebijakan yang sedang berjalan (**R**elevant), dan memperhitungkan batas waktu pencapaian (**T**ime-bound). yang disingkat dengan SMART, diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Spesific/Spesifik (S)*; indikator jelas dan focus (tidak menimbulkan multitafsir).
- 2) *Measurable/Terukur (M)*; dapat diukur dengan skala penilaian tertentu (kuantitas atau kualitas).
- 3) *Achievable (A)*; dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dengan metode yang sesuai, berada dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 4) *Result-Oriented/Relevant (R)*; terkait secara logis dengan kebijakan/program/kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi.

- 5) *Time-Bound* (T); memperhatikan rentang waktu pencapaian, untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya, dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Karena fitur atau metode SMART ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Analisis Situasi:

Pahami kondisi saat ini dari Dinas Pertanian, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.

- 2) Penetapan Tujuan:

Tentukan Tujuan yang jelas untuk Dinas pertanian yang akan membimbing penetapan target.

- 3) Tujuan Strategis:

Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

- 4) Indikator Kinerja:

Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan - tujuan tersebut.

- 5) Target Spesifik:

Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.

- 6) Rencana Aksi:

Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

- 7) Monitoring dan Evaluasi:

Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, merupakan Tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen teknis operasional.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	A (89,53)
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	100
		Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Rp. Triliyun	3,10

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka dukungan program/kegiatan sangat perlu diperhatikan seperti Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Program Pendukung Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula Penghitungan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Hasil Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pertanian oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Hasil Penilaian Saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi IGA	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Jumlah PDRB dari Sektor Pertanian Berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) Tahun	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				Penyuluhan Pertanian

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2024 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada Tahun 2024, dilakukan mekanisme pergeseran anggaran sehingga anggaran yang tidak terserap pada beberapa kegiatan dapat dialihkan dan dimaksimalkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang lain. Pergeseran Anggaran tercantum dalam dokumen Pergeseran Anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	A (89,53)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	100
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3,10 Triliyun

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025, diolah

Dilihat dari Tabel 2.5 di atas, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian, target dihitung berdasarkan hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pertanian oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian, target dihitung berdasarkan hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA; dan
- c. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK), target dihitung berdasarkan jumlah PDRB dari sektor pertanian berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun.

Tabel 2.6
Program dan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	A (89,53)	19.497.059.647
2.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	100	60.571.082
3.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3.10 Triliyun	936.389.611
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			3.618.429.526
	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			632.472.830
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			243.358.000
	Penyuluhan Pertanian			10.116.600.000
Jumlah				35.104.880.696

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2024. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja
Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Misi	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2024		
					Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	A (89,53)	A (88,92)*	99,32
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	100,00	90,00	90,00
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliyun	3.10	3,05*	98,39
Rata-rata capaian (%)							95,90

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 ini ada 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dengan target A (89,53).

Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian adalah A (88,92) atau sebesar 99,32% dengan predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian ini memakai nilai evaluasi Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2024 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2025.

- 2) Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian dengan target 100,00.

Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian adalah 90,00 atau sebesar 90,00% dengan predikat **sangat baik**.

- 3) Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) dengan target 3,10 triliyun.

Capaian indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) adalah 3,05 triliyun atau sebesar 98,39% dengan predikat **sangat baik**. Realisasi Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2024 memakai Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2023 dikarenakan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2024 dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan pada bulan April Tahun 2025.

Capaian rata-rata ke 3 (tiga) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 95,90% dengan predikat **sangat baik**.

3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pertanian Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	A (89,53)	A (88,92)*	99,32
Rata-rata capaian (%)						99,32

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2024 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2024 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	A (88,77)	A (88,92)	A (88,92)*

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	A (88,92)*	AA (90,43)	98,33	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai Sakip Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumbar	Kementerian Pertanian Republik Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tanpa Satuan	A (88,92)*	BB (75,03)*	BB**

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

***) Data Capaian Tahun 2022

Sumber : 1. Dinas Perkebunan, TP dan Hortikultura Prov. Sumbar

2. <http://1data.menpan.go.id>

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

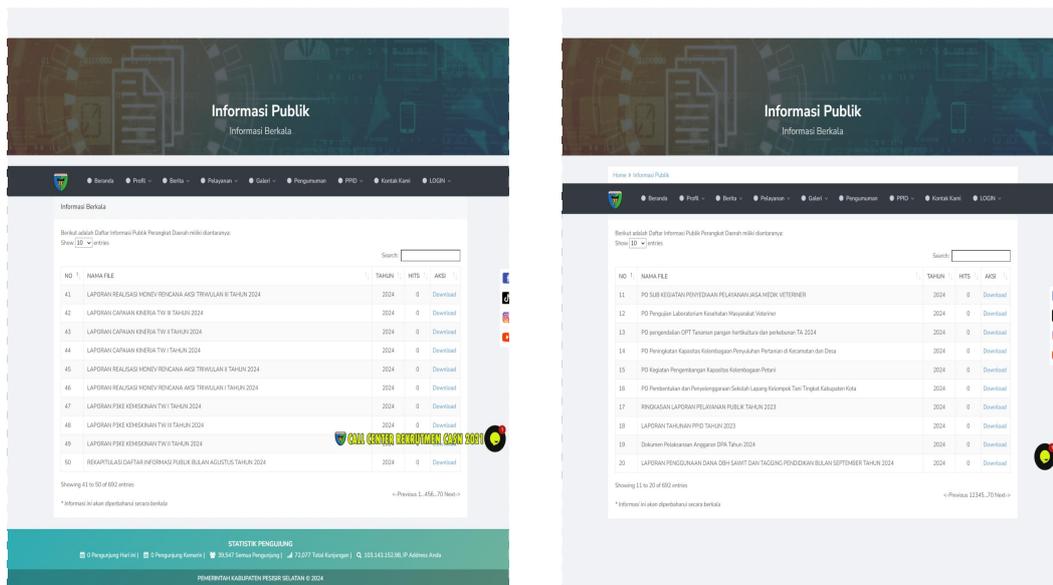
1. Perencanaan Kinerja

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan

d. Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://disperta.pesisirselatankab.go.id> dengan tampilan sebagai berikut :



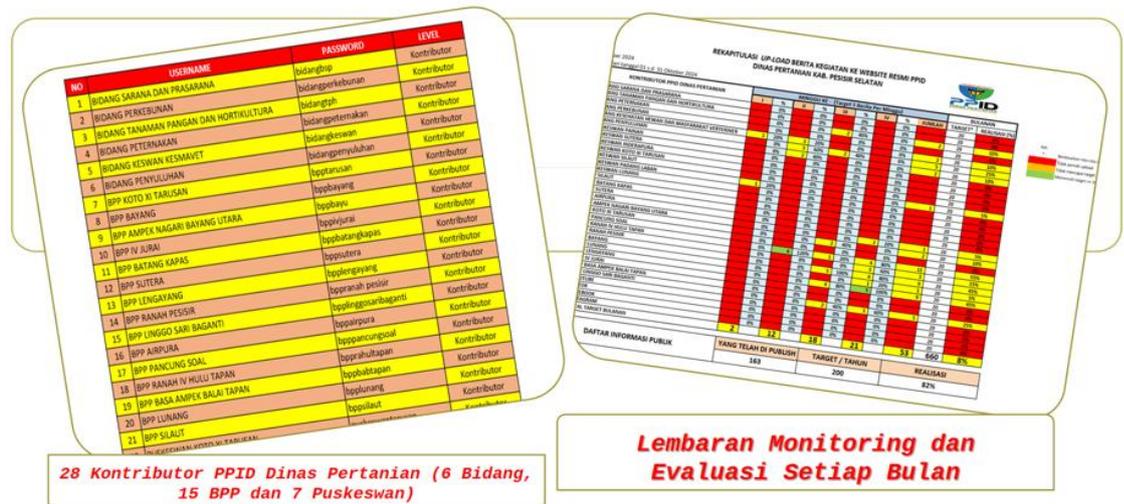
Gambar 3.1 : Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 3.2 : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian **reward** dan **punishment**. Dinas Pertanian selama Tahun 2024 telah memberikan **reward** dan **punishment** terhadap capaian kinerja bawahan. Dalam hal ini, Dinas Pertanian menilai kinerja bawahannya melalui aktivitas keaktifan dalam pemanfaatan website untuk publikasi pelaksanaan kegiatan (keterbukaan informasi publik). Pada Dinas Pertanian terdapat 28 (dua puluh delapan) kontributor yang tersebar se Kabupaten Pesisir Selatan terbagi kedalam beberapa bidang teknis yang melakukan publikasi pada PPID Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres publikasi masing-masing kontributor, sebagaimana dapat dilihat hasil monev terhadap kontributor pada Gambar 3.3 dibawah ini :



Gambar 3.3 : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Secara Berkala Pada Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan Selama Tahun 2024



Gambar 3.4 : Pemberian Reward dan Punishment Terhadap Capaian Kinerja Bawahan yang meliputi Peringkat Terbaik I, II dan III dan Peringkat I, II dan III Terbawah

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga memberikan **reward** dan **punishment** terhadap kinerja perangkat daerah Tahun 2023 yang diserahkan pada awal Tahun 2024. Dinas Pertanian memperoleh peringkat **Terbaik I** tingkat Kabupaten Pesisir Selatan **Atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** di

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, pada Gambar 3.5 dibawah dapat dilihat aktivitas penyerahan sertifikat dari Asisten III ke Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 3.5 : *Pemberian Reward dan Punishment kepada Capaian Kinerja Perangkat Daerah oleh Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan*

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.6 dan 3.7 dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi dan Cover Laporan Kinerja yang telah disusun serta cover Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 3.6 : Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi



Gambar 3.7 : Dokumen LKj dan Laporan Hasi Evaluasi LKj Tahun 2023

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 3.8 dibawah ini :



Gambar 3.8 : Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024

Semua pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten selama Tahun 2024 dilakukan publikasi pada media sosial yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Youtube



: Pertanian pessel



Gambar 3.9 : Youtube Dinas Pertanian

2. Facebook



: Dinas Pertanian Kab Pessel (Dinas pertanian pessel)

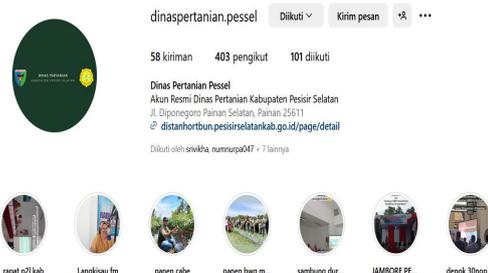


Gambar 3.10 : Facebook Dinas Pertanian

3. Instagram



: dinaspertanian.pessel



Gambar 3.11 : Instagram Dinas Pertanian

4. Tiktok



: <http://www.tiktok.com/@dinas pertanian.pessel>



Gambar 3.12: Tiktok Dinas Pertanian

Dengan memanfaatkan semua sarana publikasi yang ada terutama website dan media sosial untuk publikasi kegiatan selama Tahun 2024, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan diganjar dengan Penghargaan Terbaik I Kategori Perangkat Daerah dengan kualifikasi “**Informatif**” dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana pada Gambar 3.13 dibawah ini :



Gambar 3.13 : Piagam Penghargaan Terbaik I Kategori Perangkat Daerah dengan kualifikasi “**Informatif**” dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	A (89,53)	A (88,92)*	99,32	19.497.059.647,00	17.050.876.320,00	87,45	11,95

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 11,95%.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2024 adalah A (89,53), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Pertanian Tahun 2023 sebesar A (88,92) serta untuk capaian kinerja sebesar 99,32%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,17% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar A (88,77).

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	29,06
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,36
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,12
4	Evaluasi Internal	25,00	21,38
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja		100,00	
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.			88,92
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)			A

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi

Gambar 3.14 : Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

1) Perencanaan Kinerja

Agar setiap pegawai untuk dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan melakukan pemantauan kinerja sesuai dengan Rencana Aksi dan apabila terdapat permasalahan agar dilakukan analisa dan solusi atas permasalahan yang ditemukan.

2) Pengukuran Kinerja

a) Agar pengukuran kinerja dijadikan kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara aktif, efisien dan diukur secara berjenjang berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala;

b) Agar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment pada seluruh pegawai;

c) Agar meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen dalam mencapai kinerja kepada seluruh pegawai dengan mengadakan rapat-rapat staf dan dievaluasi secara berkala.

3) Pelaporan Kinerja

a) Agar dokumen laporan kinerja menginformasikan kualitas dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada setiap sasaran;

b) Agar informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja pegawai melalui rapat-rapat staf dan evaluasi secara berkala.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a) Agar pemantauan capai kinerja dilakukan pendalaman yang memadai pada seluruh sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan perangkat daerah secara berkala dan dievaluasi;

b) Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi AKIP dan menuangkan ke dalam matriks tindak lanjut;

c) Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah disampaikan melalui rapat-rapat staf serta dievaluasi secara berkala.

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :

**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERTANIAN**
Jalan Diponegoro, Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile. (0756) 21408 Pannan
Email: dsiperta@pesirselatankab.go.id, dsiperta@pesirselatankab.go.id
Laman: dsiperta.pesirselatankab.go.id

Painan, 17 Februari 2025

Nomor : 000.8.6.3/85/Distan/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan

Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 700.1.2.1/06/Insp-PS/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal sama dengan pokok diatas, maka bersama ini dikirimkan dokumen tindak lanjut dimaksud seperti daftar terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pertanian



MADRANTO, S.Hut, MH
NIP.19780519.200501.1.009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (B2C), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 000.8.6.3/85/Distan/2025
Tanggal : 17 Februari 2025

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I Perencanaan Kinerja						
1	Agar setiap pegawai untuk dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan melakukan pemantauan kinerja sesuai dengan Rencana Aksi dan apabila terdapat permasalahan agar dilakukan analisa dan solusi atas permasalahan yang ditemukan	Rapat evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi	Per triwulan	Januari 2024 - Desember 2024	Seluruh Bidang	Selesai
II Pengukuran Kinerja						
a	Agar pengukuran kinerja berjalan dengan baik dan berkesinambungan serta diukur secara berkala	Rapat evaluasi kinerja berjalan dan berkesinambungan secara berkala	Per triwulan	Januari 2024 - Desember 2024	Seluruh Bidang	Selesai
b	Agar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment pada seluruh pegawai	Memberikan reward dan punishment	Seluruh Pegawai	Januari 2024 - Desember 2024	Sekretariat (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	Selesai
c	Agar meningkatkan	Rapat evaluasi	Per triwulan	Januari 2024	Seluruh	Selesai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (B2C), Badan Siber dan Sandi Negara

peningkatan dan komitmen dalam mencapai kinerja kepada seluruh pegawai dengan mengadakan rapat-rapat staf dan dievaluasi secara berkala	meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen dari pencapaian kinerja secara berkala		- Desember 2024	Bidang		
III Pelaporan Kinerja						
a	Agar Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan kualitas dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada setiap Sasaran	Memperbaiki penyajian LKJ sesuai rekomendasi	1 Dokumen	Maret 2024	Sekretariat (Perencanaan dan Pelaporan)	Selesai
b	Agar informasi dalam laporan kinerja dapat mengungkap perubahan budaya kerja pegawai melalui rapat-rapat staf dan evaluasi secara berkala	- Menginformasikan semua informasi dalam laporan kinerja agar dapat mengungkap budaya kerja pegawai - Rapat evaluasi secara berkala	- 1 Dokumen - Per triwulan	Januari 2024 - Desember 2024	Sekretariat (Perencanaan dan Pelaporan)	Selesai
IV Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						
a	Agar pemantauan capaian kinerja dilakukan dengan penilaitan yang memadai pada seluruh Sasaran dan indikator Kinerja Perangkat Daerah masuk pada Uji Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan Perangkat Daerah secara berkala dievaluasi	Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dilakukan pada seluruh sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah dari UPT secara berkala		Januari 2024 - Desember 2024	Seluruh Bidang	Selesai
b	Agar tindak lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP dan muanangkan ke dalam matrik tindak lanjut	Membuat dokumen matrik tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP	1 Dokumen	April 2024	Sekretariat (Perencanaan dan Pelaporan)	Selesai
c	Agar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dimanfaatkan untuk perbaikan dan	- Pemanfaatan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas	- 1 Dokumen - Per triwulan	Januari 2024 - Desember 2024	Seluruh Bidang	Selesai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (B2C), Badan Siber dan Sandi Negara

peringkatan Akuntabilitas Kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja Perangkat Daerah disampaikan melalui rapat-rapat serta dievaluasi secara berkala	Kinerja untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja - Rapat evaluasi secara berkala				
--	--	--	--	--	--

Kepala Dinas Pertanian



MADRANTO, S.Hut, MH
NIP.19780519.200501.1.009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (B2C), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 3.15 : Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pertanian Tahun 2023

**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
- e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2024 adalah sebesar Rp.17.050.876.320,00 atau 87,45% dari total anggaran sebesar Rp. 19.497.059.647,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 12,55%.



SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	100,00	90,00	90,00
Rata-rata capaian (%)						90,00

Sumber : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024.

Dari Tabel 3.8 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian mencapai 90,00 dari target 100,00 atau tingkat capaiannya mencapai 90,00%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yaitu “DOVAC (Door to Door

Gambar 3.16 : Hasil Penilaian Inovasi Tahun 2023

Vaccination Action)”) dengan predikat tinggi yang sudah tahap implementasi sejak Tahun 2022. DOVAC adalah suatu inovasi baru pada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam menurunkan jumlah hewan yang terinfeksi penyakit dengan dilakukan vaksinasi oleh petugas vaksinator dengan cara melaksanakan vaksinasi ternak/hewan dari rumah ke rumah (door to door). Disinyalir vaksinasi dari rumah ke rumah (door to door) memberikan dampak yang sangat efektif terhadap pencegahan penyakit hewan dan ternak di Kabupaten Pesisir Selatan sejak Tahun 2022. Satu lagi Inovasi yaitu **Varietas Durian Ponger yang sudah tahap implementasi pada Tahun 2024. Namun inovasi tidak dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (nilai kematangan inovasi dibawah 80). Varietas Durian Ponger adalah suatu inovasi baru pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka melakukan permurnian dan pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) komoditi hortikultura varietas durian lokal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.17 dibawah ini dapat dilihat Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2024 sebagai berikut :**

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. H. Agus Salim Nomor 11 Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 25611
Telepon : (0756) 21313 Faksimili : (0756) 22253
Laman : <https://webid.pesisirselatankab.go.id/Peweb/KepalaDinas@pesisirselatankab.go.id>

Pesisir Selatan, 30 Desember 2024

Nomor : 500.10.30.3/135/Bapedalibang/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : **Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2024**

Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD M. Zain Pailan
3. Direktur RSUD Pratama Tapan
4. Kepala UPT Puskesmas, se Kabupaten Pesisir Selatan
di Tempat

Menindaklanjuti kegiatan *Innovative Government Award (IGA)* yang di selenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Pesisir Selatan telah mengirimkan inovasi sebanyak 97 Inovasi yang bersumber dari Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, dengan rincian umum sebagai berikut :

- 93 Penerapan, 3 inisiatif dan 1 uji coba.
- Inovasi daerah yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui IGA adalah sebanyak 50 Inovasi.
- Tidak mengirimkan atau melaporan inovasi daerah :
 - 2 Perangkat Daerah;
 - 3 Kecamatan dan;
 - 5 UPT Puskesmas.

Hasil IGA sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2024 bahwa Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **99,26** atau termasuk dalam Predikat **"KABUPATEN INOVATIF"**. (Rincian Terlampir)

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi khususnya terhadap pernjangan kinerja saudara dan perbaikan kinerja selanjutnya. Terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN,

S(ttd)

MAWARDI ROSKA

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1						
		Asrama di UPT SMPN 7 Sulea			Perbaikan Nilai Kematangan < 70	
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	HCNTA PTSP KLIK/LKPM	Inovasi pelayanan publik	95	Approve	Sangat Tinggi
		CIN Pesisir	Inovasi pelayanan publik	58	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan < 70	Cukup
8.	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Optimalisasi Penerapan Elektronik Retribusi Pesisir (E-Pes)	Inovasi pelayanan publik	95	Approve	Sangat Tinggi
9	Dinas Pariwisata, Kependudukan dan Olahragra	Optimalisasi dan Pengembangan Aplikasi SPPORA (Sistem Informasi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Usulan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	94	Approve	Sangat Tinggi
10.	Dinas Perikanan dan Pangan	GEMARWANI (CESRAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN) FORUM KOMUNIKASI UNIT PEMBENIHAN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Usulan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	93	Approve	Sangat Tinggi
			Inovasi pelayanan publik	63	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan < 70	Cukup
11.	Dinas Kesehatan	PASAN MANDE Rang Pesisir (Rangkul Angkut Pasien- Pasien Emergency)	Inovasi pelayanan publik	91	Approve	Sangat Tinggi
			Inovasi pelayanan publik	34	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan < 70	Rendah
12.	Dinas Pertanian	DOVAC (Door To Door Vaccination Action) Varietas Durian Ponger	Inovasi pelayanan publik	90	Approve	Tinggi
			Inovasi Daerah lainnya sesuai	78	Tidak Terkirim	-

Gambar 3.17: Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2024

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	85,00	92,00	90,00

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024.

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,17% dari 92,00 pada Tahun 2023 menjadi 90,00 pada Tahun 2024.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	90,00	100,00	90,00	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	100,00	90,00	90,00	Tidak tercapainya nilai kematangan inovasi Dinas Pertanian dikarenakan masih bersifat manual/ konvensional, belum terintegrasi, pemanfaatan inovasi hanya terfokus pada kelompok tertentu/tidak umum serta tidak adanya replikasi oleh daerah lain	Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh daerah lain

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.12
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	100,00	90,00	90,00	60.571.082,00	54.117.150,00	89,34	0,73

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.12 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,73%.

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian tahun berikutnya adalah :

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
3. Manajemen inovasi; dan
4. Keberlanjutan inovasi.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; dan
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian adalah sebesar Rp. 54.117.150,00 atau 89,34% dari total anggaran sebesar Rp. 60.571.082,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 10,66%.



Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan indikator kinerjanya yaitu Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK).

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini.

Tabel 3.13
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliyun	3,10	3,05*	98,39
Rata-rata capaian (%)						98,39

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024, diolah

Dari Tabel 3.13 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2024 menggunakan angka capaian Tahun 2023 dengan tingkat capaian sebesar 98,39% predikat **Sangat Baik**.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.14 dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan
Beberapa Tahun Terakhir

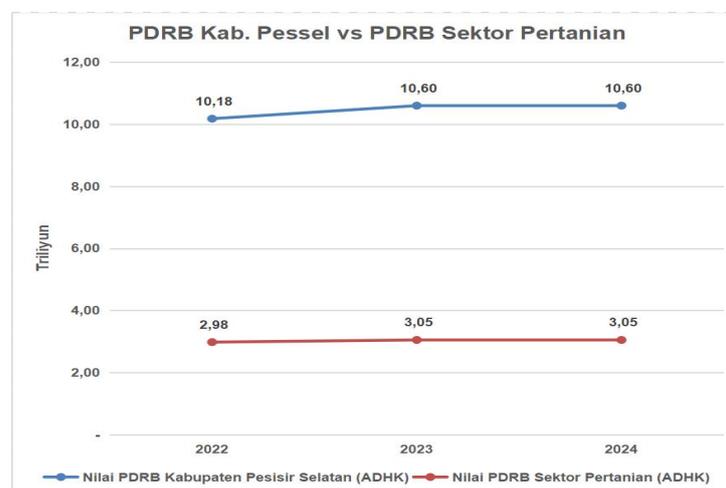
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	2,98 Triliyun	3,05 Triliyun	3,05 Triliyun*

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, diolah

Dari Tabel 3.14 diatas dapat dijelaskan bahwa sejak pandemi Covid-19 menyerang Indonesia pada awal Tahun 2020, seluruh sektor mulai merangkak bangkit kembali ke kondisi awal setelah mengalami keterpurukan. Lain halnya dengan sektor pertanian, sektor pertanian mencatat peningkatan selama pandemi dan sesudah pandemi berlalu. Pada Grafik 3.1 dibawah ini dapat dilihat capaian Nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK) dan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2022 s.d Tahun 2024 sebagai berikut :

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dengan PDRB Sektor Pertanian Tahun 2022 s.d Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, diolah

Dari Grafik 3.1 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dan nilai PDRB sektor pertanian mengalami peningkatan pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022.

Pertanian merupakan salah satu sektor paling berpengaruh di Kabupaten Pesisir Selatan yang terbukti dengan kontribusinya terhadap PDRB yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor lain. Kontribusi terbesar



terhadap PDRB Sektor Pertanian adalah tanaman pangan kemudian disusul oleh perkebunan tahunan, peternakan, tanaman hortikultura tahunan dan lainnya, tanaman hortikultura semusim, jasa pertanian dan

perburuan. Tingginya kontribusi tanaman pangan dan perkebunan tahunan tidak lain disebabkan oleh komoditas padi, jagung dan kelapa sawit yang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3,05 Triliyun*	3,23 Triliyun	94,43	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, dapat dilihat pada Tabel 3.16 dibawah ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliyun	3,05*	191,07*	965,81*

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Dari Tabel 3.16 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai capaian PDRB Provinsi Sumatera Barat adalah nilai capaian PDRB total Tahun 2023 karena data rincian capaian nilai PDRB sektor pertanian tidak tersedia. Kontribusi nilai PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan terhadap PDRB Sektor Pertanian Indonesia sebesar 0,31%, jika dilihat kontribusi terhadap PDRB Sektor Pertanian Indonesia sangat kecil, tapi sektor pertanian menyumbangkan kontribusi yang terbesar terhadap PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) dapat dilihat pada Tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel 3.17
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliyun	3,04	3,05*	98,39	Peningkatan nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tidak terlepas dari peningkatan produksi pertanian	Meningkatkan produksi pertanian

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Capaian produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 s.d Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.18 dibawah ini :

Tabel 3.18
Capaian Produksi Pertanian Tahun 2022 s.d Tahun 2024
di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Komoditi	Satuan	2022	2023	2024*
1	2	3	4	5	6
1	Padi	Ton	161.639	201.974,00	167.598,08
2	Jagung	Ton	208.011	147.741,00	127.921,37
3	Cabe Merah	Ton	5.042	4.975,05	3.841,46
4	Bawang Merah	Ton	146	453,25	71,05
5	Durian	Ton	18.482	16.025,10	20.741,10
6	Manggis	Ton	4.695	3.373,70	3.482,10
7	Jeruk	Ton	4.465	4.412,20	3.866,10
8	Jengkol	Ton	5.747	6.297,20	8.207,70
9	Kelapa Sawit	Ton	79.850	77.352,07	78.124,30
10	Kelapa Dalam	Ton	3.154	3.509,26	3.471,69
11	Kopi	Ton	2.373	2.506,22	2.510,08
12	Gambir	Ton	5.944	5.667,61	7.271,46
13	Pala	Ton	912	1.007,18	1.065,66
14	Daging Sapi	Ton	1.811	1.687	1.570,32
15	Daging Kerbau	Ton	63	53	37,29
16	Daging Kambing	Ton	36	36	18,14
17	Daging Ayam	Ton	4.607	2.973	2.906,34
18	Daging Itik	Ton	128	299	90,99
19	Telur Ayam	Ton	1.199	920	844,85
20	Telur Itik	Ton	1.197	2.790	849,58
Jumlah		Ton	509.500	484.051,84	434.489,66

Catatan : *) Angka Sementara Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025, diolah

Dari Tabel 3.18 diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Beberapa

komoditi yang mengalami peningkatan mulai dari yang terbesar yaitu durian, manggis, jengkol, kelapa sawit, kopi, gambir dan pala. Komoditi yang mengalami penurunan yang terbesar adalah padi dan jagung serta komoditi lainnya. Naik dan turunnya produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut :'

1. Luas Lahan

Luas lahan merupakan poin penting terhadap produksi komoditas pertanian. Secara umum, luas lahan berbanding lurus dengan produksi sehingga untuk meningkatkan produksi maka langkah konsevatif yang diambil adalah memperluas lahan, namun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, lahan pertanian mulai tergeser dengan lahan pemukiman sehingga produksi pertanian pun terganggu. Pada Tabel 3.19 dibawah ini dapat dilihat luas lahan sawah per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.19
Luas Lahan Sawah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

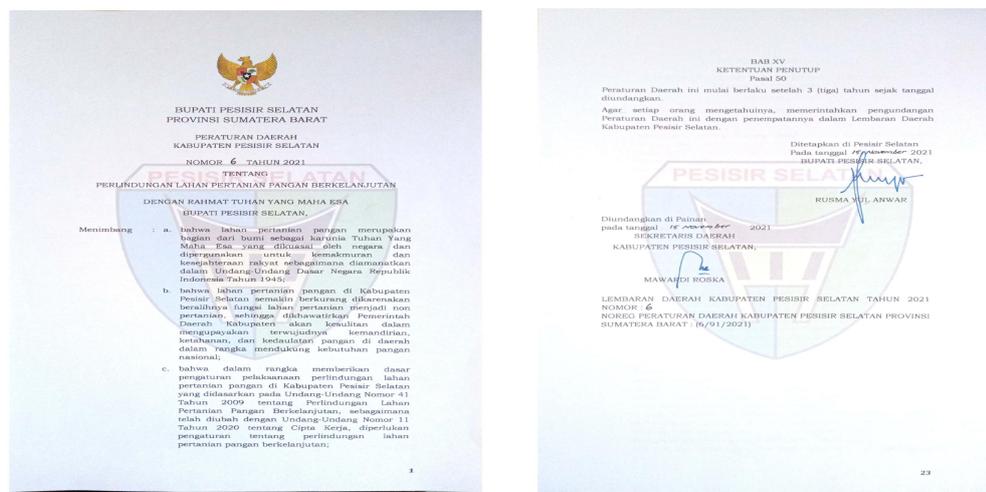
No	Kecamatan	Irigasi (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Pasang Surut (Ha)	Lebak (Ha)	Jumlah (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Silaut	-	-	-	-	-
2	Lunang	681	610,41	-	-	1.291,41
3	BAB Tapan	1.020,89	129	-	-	1.149,89
4	Rahul Tapan	721,30	18	-	-	739,30
5	Pancung Soal	1.399,65	51	-	-	1.450,65
6	Airpura	819,89	-	32	-	851,89
7	Linggo Sari Baganti	773	1.727,54	-	-	2.500,54
8	Ranah Pesisir	1.495	1.092,11	-	-	2.587,11
9	Lengayang	2.597,58	300	-	33	2.930,58
10	Sutera	1.828	866,91	7	19	2.720,91
11	Batang Kapas	1.439	282,89	-	-	1.721,89
12	IV Jurai	1.360,67	37	-	-	1.397,67
13	Bayang	1.628,19	478	-	-	2.106,19
14	Bayang Utara	398	72,31	-	-	470,31
15	Koto XI Tarusan	1.139,75	827	-	-	1.966,75
Jumlah		17.301,92	6.492,17	39	52	23.885,09

Sumber : Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2025, diolah

Untuk mempertahankan lahan sawah dari alih fungsi lahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda ini mengatur penggunaan lahan pertanian pangan agar tidak dialih fungsikan ke penggunaan selain komoditi pangan seperti tanaman perkebunan, perumahan, fasilitas umum dan lain-lain. Didalam Perda ada 3 (tiga) kelas lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yaitu :

- a) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- b) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B); dan
- c) Lahan Rawan Konversi.

Bagi individu dan badan usaha yang akan memanfaatkan lahan pertanian yang bukan untuk komoditi pangan harus mendapatkan rekomendasi pemanfaatan dari Dinas Pertanian, jika lahan tersebut masuk lahan yang dilindungi maka Dinas Pertanian tidak memberikan rekomendasi pemanfaatan lahan tersebut begitu juga sebaliknya. Sejak penerapan Perda ini, telah banyak usulan pemanfaatan yang diajukan oleh individu dan badan usaha sehingga telah dapat mengendalikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari alih fungsi lahan. Pada Gambar 3.18 dibawah ini dapat dilihat tampilan Perda LP2B tersebut sebagai berikut :



Gambar 3.18 : Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Pada Gambar 3.19 dibawah ini contoh Rekomendasi Pemanfaatan Lahan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pertanian untuk dapat dimanfaatkan oleh individu atau badan usaha dikarenakan tidak berada pada lahan yang dilindungi.



Gambar 3.19: Contoh Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Pertanian

2. Produktivitas Tanaman

Menurut FAO (*Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa*) Produktivitas tanaman adalah ukuran dari jumlah hasil yang dihasilkan oleh tanaman tertentu dalam satuan luas tanah atau per unit input tertentu, seperti air, pupuk, atau tenaga kerja, dalam jangka waktu tertentu. Produktivitas tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana tanaman dapat menghasilkan hasil yang optimal.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tanaman:

a) Faktor Internal

Genetika Tanaman: Genetika tanaman adalah faktor internal yang paling mendasar. Varietas atau jenis tanaman yang digunakan akan

memiliki karakteristik genetik tertentu yang memengaruhi produktivitasnya, seperti resistensi terhadap penyakit, ukuran hasil, dan potensi pertumbuhan.

Umur Tanaman: Siklus hidup tanaman, termasuk fase pertumbuhan, berbunga, dan berbuah, memengaruhi jumlah hasil yang dapat dihasilkan. Tanaman yang memiliki siklus pendek mungkin lebih produktif karena dapat ditanam lebih sering dalam satu tahun.

Kesehatan Tanaman: Kesehatan tanaman, termasuk kebebasan dari penyakit dan serangga, sangat penting untuk produktivitas. Tanaman yang sehat cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik.

Nutrisi Tanaman: Ketersediaan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dalam tanah dapat memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pemberian pupuk yang tepat dapat meningkatkan produktivitas.

Kerapatan Tanaman: Jarak antara tanaman (kerapatan tanam) dapat memengaruhi kompetisi untuk sumber daya seperti air, cahaya matahari, dan nutrisi. Kerapatan yang optimal perlu dipertimbangkan untuk mencapai produktivitas maksimum.

b) Faktor Eksternal

Lingkungan: Faktor lingkungan seperti cuaca, suhu, curah hujan, dan kelembaban udara memiliki dampak besar pada produktivitas tanaman. Tanaman yang tumbuh dalam kondisi lingkungan yang sesuai akan lebih produktif.

Tanah: Kualitas tanah, termasuk tekstur, struktur, pH, dan kandungan bahan organik, mempengaruhi kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi. Tanah yang subur dan sehat mendukung produktivitas yang lebih tinggi.

Manajemen Pertanian: Cara tanaman dikelola, termasuk pemilihan varietas yang tepat, penggunaan pupuk dan pestisida, serta praktik irigasi dan pemeliharaan, berdampak besar pada produktivitas. Manajemen yang baik dapat meningkatkan hasil.

Pestisida dan Penyakit: Serangan hama dan penyakit dapat merusak tanaman dan mengurangi produktivitas. Kontrol hama dan penyakit yang efektif diperlukan untuk menjaga produktivitas tanaman.

Teknologi Pertanian: Penggunaan teknologi modern seperti irigasi berbasis sensor, pemantauan pertanian berbasis data, dan pemilihan varietas unggul dapat meningkatkan produktivitas tanaman.

Upaya Peningkatan Produktivitas Tanaman di Kabupaten Pesisir Selatan

Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Berikut adalah beberapa upaya peningkatan produktivitas tanaman di Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Pemilihan Varietas Unggul

Memilih varietas tanaman yang memiliki sifat-sifat yang menguntungkan, seperti ketahanan terhadap penyakit, adaptabilitas terhadap kondisi lingkungan, dan hasil yang tinggi, dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Varietas Unggul Nasional yang sudah dilepaskan oleh Kementerian Pertanian RI yaitu Varietas Unggul Padi Sawah Bawaan Varietas Unggul Jengkol yaitu Jengkol Lokan Pessel dan Jengkol Barih Pessel. Aktivitas-aktivitas penyaluran benih tanaman dapat dilihat pada Gambar 3.20 dibawah ini :





Gambar 3.20 : Penyaluran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

2. Pemberian Pupuk yang Tepat

Menerapkan pemupukan yang tepat berdasarkan analisis tanah dan kebutuhan tanaman dapat memastikan bahwa tanaman mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang baik.

3. Pengelolaan Tanah yang Baik

Menerapkan praktik-praktik pengolahan tanah yang optimal, penanaman penutup tanah, dan penggunaan bahan organik dapat meningkatkan struktur tanah dan ketersediaan nutrisi.



Gambar 3.21 : Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian ke Kelompok Tani

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Irigasi Tersier

Air merupakan faktor produksi utama pertanian, keberadaan dan berfungsinya infrastruktur air merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian khususnya padi, salah satu program yang harus dilaksanakan adalah rehabilitasi jaringan irigasi. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun. Pengelolaan irigasi harus memenuhi syarat kewenangan, diharapkan pada kesempatan ini seluruh stake holder terkait baik BWSS V, Provinsi dan Kecamatan dapat berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemecahan permasalahan terhadap kinerja sistem irigasi yang ada terutama pada kewenangan kabupaten kota yang merupakan daerah irigasi dengan jumlah dan luas yang paling besar sehingga kedepan masalah rehabilitasi jaringan irigasi tersebut dapat kita cari solusinya. Aktivitas-aktivitas rehabilitasi jaringan irigasi tersier pada Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.22 dibawah ini :



Gambar 3.22 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahun 2024

Selain rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemenuhan akan air terhadap petani juga melalui pemberian bantuan pompa air terutama sawah-sawah tadah hujan. Aktivitas-aktivitas penyaluran pompa air

ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.23 dibawah ini :



Gambar 3.23 : Penyaluran pompa air ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Pengendalian Hama dan Penyakit

Menggunakan teknik pengendalian hama dan penyakit yang efektif, termasuk pemilihan varietas tahan penyakit dan pemantauan teratur, dapat mencegah kerugian hasil yang signifikan. Aktivitas-aktivitas Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit pada Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.24 dibawah ini :



Gambar 3.24 : Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit (SL-PHT) Tahun 2024

6. Praktik Penanaman yang Tepat

Mengatur jarak tanam yang sesuai, kedalaman penanaman, dan waktu tanam berdasarkan pada varietas dan kondisi lingkungan adalah kunci dalam meningkatkan produktivitas. Salah satu teknologi budidaya yang dipakai petani di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sistem tanam “Jajar Legowo”. sistem jajar legowo ada beberapa jenis yang biasa diterapkan oleh petani di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu “Jajar Legowo 2:1, 3:1 dan 4:1”. Berdasarkan hasil yang didapatkan jajar legowo 2:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 33 persen, jajar legowo 3:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 25 persen dan jajar legowo 4:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 18 persen. Aktivitas penanaman jajar legowo di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat seperti Gambar 3.25 dibawah ini :



Gambar 3.25 : Penanaman sistem Jajar Legowo 2:1 (sebelah kiri) dan Jajar Legowo 3:1 (sebelah kanan)

7. Pemangkasan

Pemangkasan tanaman dengan benar dapat merangsang pertumbuhan tunas baru, memaksimalkan pemanfaatan cahaya matahari, dan meningkatkan hasil tanaman yang dibudidayakan. Aktivitas pemangkasan dapat dilihat pada Gambar 3.26 dibawah ini :



Gambar 3.26 : Pemangkasan tanaman upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman

8. Penggunaan Teknologi Pertanian

Menerapkan teknologi modern seperti pemantauan berbasis data, aplikasi mobile, dan sistem irigasi otomatis dapat membantu meningkatkan manajemen pertanian dan mengoptimalkan produktivitas. Aktivitas penggunaan drone dalam pemantauan berbasis data terhadap luas tanam tanaman pangan seperti Gambar 3.27 dibawah ini :





Gambar 3.27 : Pemantauan luas tanam padi sawah menggunakan drone

9. Perlindungan Terhadap Cuaca Ekstrem

Menyediakan perlindungan fisik, seperti rumah kaca atau jeruji, dapat membantu melindungi tanaman dari cuaca ekstrem, yang dapat merusak hasil.

10. Pelatihan dan Pendidikan

Memastikan bahwa petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam manajemen pertanian yang efektif sangat penting. Pelatihan dan pendidikan pertanian dapat membantu dalam menerapkan teknik-teknik yang benar. Aktivitas peningkatan kapasitas petugas dan petani/kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.28 dibawah ini :





Gambar 3.28 : Pendidikan dan pelatihan petugas dan kelompok tani Tahun 2024

3. Peningkatan Populasi Ternak

Peningkatan produksi peternakan baik itu daging maupun telur salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan jumlah populasi ternak. Upaya peningkatan populasi ternak yang dilakukan adalah pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) oleh tenaga Inseminator dimana target setiap tahunnya sebanyak 10.000 straw dan bantuan ternak ke peternak. Aktivitas Inseminasi Buatan oleh Inseminator dapat dilihat pada Gambar 3.29 dibawah ini :



Gambar 3.29 : Aktivitas peningkatan populasi ternak unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) oleh Inseminator Tahun 2024

Aktivitas penyaluran ternak ke Kelompok Tani dapat dilihat pada Gambar 3.30 dibawah ini :



Gambar 3.30 : Penyaluran ternak ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.20
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3,10 Trilyun	3,05 Trilyun*	98,39	15.547.249.967,00	12.965.331.673,00	83,39	15,24

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.20 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 15,24%.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; dan
 2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman.
 - c. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain,

kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian, kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian.
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian, kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 2. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya; dan
 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, program ini terdiri atas 4 (empat) kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular;
 2. Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan; dan
 3. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM
- c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium; dan
 2. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 1. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan; dan
 2. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
5. Program Penyuluhan Pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa; dan

3. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota..

Upaya peningkatan capaian kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tahun berikutnya yaitu prioritas program dan kegiatan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam meningkatkan produksi pertanian/peternakan dan menumbuhkembangkan “**Petani Milenial**”, karena tenaga kerja salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan nilai PDRB sektor pertanian.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) adalah sebesar Rp. 12.965.331.673,00 atau 83,39% dari total anggaran sebesar Rp. 15.547.249.967,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 16,61%.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 pada Tabel 3.21 berikut.



Tabel 3.21
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 yang Menunjang Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	A (89,53)	A (88,92)	99,32	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.631.319.727	19.497.059.647	17.050.876.320	87,45	Data capaian Tahun 2023
						<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	257.776.099	241.376.099	226.570.750	93,87	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.005.550	31.205.550	31.056.500	99,52	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.999.800	7.999.800	7.830.500	97,88	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.999.838	7.999.838	7.748.500	96,86	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.978	4.999.978	4.872.500	97,45	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.770.933	189.170.933	175.062.750	92,54	
						<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>18.277.613.584</i>	<i>18.325.325.259</i>	<i>16.053.400.253</i>	87,60	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.662.763.621	17.662.763.621	15.420.764.057	87,31	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	609.850.000	659.980.000	630.157.196	95,48	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.963	2.581.638	2.479.000	96,02	
						<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>40.000.000</i>	<i>54.486.800</i>	<i>53.893.300</i>	98,91	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40.000.000	54.486.800	53.893.300,00	98,91	
						<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>239.422.370</i>	<i>295.313.679</i>	<i>247.233.025</i>	83,72	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.767.670	8.267.452	6.383.952	77,22	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	5.400.000	5.250.000	97,22	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.979.200	11.704.000	6.510.000	55,62	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.275.500	259.942.227	219.633.473	84,49	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	10.000.000	9.455.600	94,56	
						<i>Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	-	<i>3.896.100</i>	-	0,00	
						<i>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-	<i>3.896.100</i>	-	0,00	
						<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	-	<i>3.896.100</i>	-	0,00	



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.997.934	418.151.970	374.151.807	89,48	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.999.996	180.499.996	136.528.807	75,64	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	473.997.938	237.651.974	237.623.000	99,99	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.509.740	158.509.740	95.627.185	60,33	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	40.690.000	40.690.000	25.533.750	62,75	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92.819.938	92.819.938	49.123.735	52,92	
							24.999.802	24.999.802	20.969.700	83,88	
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	100	90	90,00	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51.163.832	60.571.082	54.117.150	89,34	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.163.832	60.571.082	54.117.150	89,34	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.987.251	44.394.501	42.700.000	96,18	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.176.581	16.176.581	11.417.150	70,58	
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3.10 Trilyun	3,05 Trilyun	98,39	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	652.867.611	936.389.611	817.743.484	87,33	Data capaian Tahun 2023
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	301.587.549	498.147.549	410.273.800	82,36	
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-	150.000.000	133.829.100	89,22	
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	301.587.549	348.147.549	276.444.700	79,40	
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	104.642.000	91.049.384	87,01	
						Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	100.000.000	104.642.000	91.049.384	87,01	
						Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	251.280.062	333.600.062	316.420.300	94,85	
						Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	251.280.062	333.600.062	316.420.300	94,85	
						Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.534.679.526	3.618.429.526	2.341.545.966	64,71	
						Pengembangan Prasarana Pertanian	1.548.929.526	1.548.929.526	469.944.850	30,34	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.548.929.526	1.548.929.526	469.944.850	30,34	



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	1.985.750.000	2.069.500.000	1.871.601.116	90,44	
						<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</i>	1.475.000.000	1.446.750.000	1.440.996.996	99,60	
						<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya</i>	510.750.000	510.750.000	421.484.120	82,52	
						<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</i>	-	112.000.000	9.120.000	8,14	
						Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	519.250.000	632.472.830	516.322.320	81,64	
						<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah</i>	275.305.170	251.245.170	192.127.920	76,47	
						<i>Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular</i>	28.000.000	18.000.000	13.365.120	74,25	
						<i>Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis</i>	33.055.000	33.055.000	20.840.200	63,05	
						<i>Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota</i>	214.250.170	200.190.170	157.922.600	78,89	
						<i>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/</i>	45.599.913	45.599.913	30.028.500	65,85	
						<i>Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat</i>	45.599.913	45.599.913	30.028.500	65,85	
						<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	95.000.000	232.282.830	206.532.200	88,91	
						<i>Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium</i>	15.000.000	18.418.800	16.307.200	88,54	
						<i>Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner</i>	80.000.000	213.864.030	190.225.000	88,95	
						<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	103.344.917	103.344.917	87.633.700	84,80	
						<i>Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>	82.017.054	82.017.054	68.886.900	83,99	
						<i>Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat</i>	21.327.863	21.327.863	18.746.800	87,90	
						Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	236.000.000	243.358.000	178.831.620	73,48	
						<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	236.000.000	243.358.000	178.831.620	73,48	
						<i>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	236.000.000	243.358.000	178.831.620	73,48	
						Penyuluhan Pertanian	9.529.600.000	10.116.600.000	9.110.888.283	90,06	
						<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	9.529.600.000	10.116.600.000	9.110.888.283	90,06	
						<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</i>	525.600.000	985.060.000	786.632.335	79,86	
						<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</i>	50.000.000	177.540.000	157.072.720	88,47	
						<i>Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>	8.954.000.000	8.954.000.000	8.167.183.228	91,21	
						Total	34.154.880.696	35.104.880.696	30.071.425.143	85,66	

Sumber : Bagian Keuangan Tahun 2025

Dari Tabel 3.21 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Plafon anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 35.104.880.696,00 (tiga puluh lima milyar seratus empat juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilah puluh enam rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 30.070.325.143,00 atau sebesar 85,66%.
2. Selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan kegiatan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.5.034.555.553,00 atau sebesar 14,34%.
3. Efisiensi penggunaan sumber daya selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 oleh Dinas Pertanian adalah sebesar 10,68%.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, rata-rata nilai capaian indikator kinerja adalah 95,90% dengan kategori **sangat baik**, dengan nilai tertinggi adalah 99,32% yaitu pada sasaran Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.

2. Capaian Indikator Kinerja

Jika dilihat dari realisasi 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dengan target A (89,09).

Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian adalah A (88,92) atau sebesar 99,32% dengan predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian ini memakai nilai evaluasi Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2024 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2025.

b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian dengan target 100.

Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian adalah 90 atau sebesar 90% dengan predikat **sangat baik**.

c. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) dengan target 3,10 triliun.

Capaian indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) adalah 3,05 triliun atau sebesar 98,39% dengan predikat **sangat baik**. realisasi Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2024 memakai Nilai

PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2023 dikarenakan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2024 dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan pada bulan April Tahun 2025

Capaian rata-rata ke 3 (tiga) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 91,90% dengan predikat **sangat baik**.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Anggaran belanja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 yang mendukung pencapaian sasaran strategis dialokasikan sebesar Rp.35.104.880.696,00 dan terealisasi sebesar Rp.30.071.425.143 atau sebesar 85,66%.

4.2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Meningkatkan kerjasama dengan Stakeholders terkait atau pemangku kepentingan, baik Pemerintah Provinsi dan Pusat, dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan serta Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Meningkatkan lagi pembinaan terhadap kelembagaan petani agar dapat meningkatkan sumber daya kelembagaan petani dan petani yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Pesisir Selatan.



DAFTAR LAMPIRAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 521-596-2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PENYULUH PERTANIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN, PETANI BERPRESTASI, BALAI PENYULUHAN KECAMATAN BERPRESTASI, DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi untuk peningkatan sumberdaya manusia petugas, petani serta kelembagaan untuk dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penggerak pembangunan sektor pertanian, perlu diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim, telah ditetapkan penerima penghargaan tingkat Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Penghargaan Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Teladan, Petani Berprestasi, Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi, dan Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 13/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan;
7. Peraturan Menteri Pertanian: Nomor 28/Pementan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Pedoman Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Teladan, Petani Berprestasi, Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi, dan Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dengan nama-nama Penerima Penghargaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Uang dan Piagam Penghargaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kategori Peningkatan SDM Pertanian yaitu:

a. Penyuluh Pertanian PNS Teladan:

- 1) Penyuluh Pertanian PNS Teladan I diberikan Uang Tabungan sebanyak Rp 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus rupiah) dan Piagam Penghargaan;
- 2) Penyuluh Pertanian PNS Teladan II diberikan Uang Tabungan sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Piagam Penghargaan; dan
- 3) Penyuluh Pertanian PNS Teladan III diberikan Uang Tabungan sebanyak Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Piagam Penghargaan.

b. Petani Berprestasi:

- 1) Petani Berprestasi I diberikan Uang Tabungan sebanyak Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Piagam Penghargaan;
- 2) Petani Berprestasi II diberikan Uang Tabungan sebanyak Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan Piagam Penghargaan; dan
- 3) Petani Berprestasi III diberikan Uang Tabungan sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Piagam Penghargaan.

2. Kategori Kelembagaan Tani yaitu:

a. Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi

- 1) Kelembagaan Ekonomi Berprestasi I diberikan Uang Tabungan sebanyak Rp 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Piagam Penghargaan;
- 2) Kelembagaan Ekonomi Berprestasi II diberikan Uang Tabungan sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Piagam Penghargaan; dan
- 3) Kelembagaan Ekonomi Berprestasi III diberikan Uang Tabungan sebanyak Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Piagam Penghargaan; dan

3. Kategori Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi yaitu:

- a. Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi I diberikan Uang Tabungan sebanyak Rp 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Piagam Penghargaan;
- b. Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi II diberikan Uang Tabungan sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Piagam Penghargaan; dan
- c. Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi III diberikan Uang Tabungan sebanyak Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Piagam Penghargaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Agustus 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



[Handwritten Signature]
MAHYELDI

A. Penyuluh Pertanian PNS Teladan

No	Penyuluh Pertanian	Nama	Tempat	Alamat
1.	Teladan 1	SULASTRI, SP	Sialang	Kecamatan...
2.	Teladan 2	JULPAJRI, SP	Sialang	Kecamatan...

Salinan dari keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Pertanian RI, di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
4. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, di Tempat;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 521 - 596 - 2024
TANGGAL 16 Agustus 2024
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PENYULUH
PERTANIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN,
PETANI BERPRESTASI, BALAI PENYULUHAN
KECAMATAN BERPRESTASI, DAN
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2024

NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN
PENYULUH PERTANIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN TAHUN 2024

A. Penyuluh Pertanian PNS Teladan

No	Penyuluh Pertanian	Nama	Alamat	Nilai
1.	Teladan 1	SULASTRI, SP.	Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya	894,00
2.	Teladan 2	AFDIRON NOVINDRA, SP.	Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	825,00
3.	Teladan 3	JULFAJRI, SP.	Nagari Talang Barat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan	810,00



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 521 - 596 - 2024
TANGGAL
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PENYULUH
PERTANIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN,
PETANI BERPRESTASI, BALAI PENYULUHAN
KECAMATAN BERPRESTASI, DAN
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2024

NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN
PETANI BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

No	Petani	Nama	Alamat	Nilai
1	Teladan 1	SUPRIYANTO.	Jorong Wonorejo, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan	923,00
2	Teladan 2	RIZA YENDRA.	Nagari Kamang Tengah, Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam	908,25
3	Teladan 3	DEWI ZETRIANI	Tarok, Nagari. Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar	892,25



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 521 - 596 - 2024
TANGGAL 16 Agustus 2024
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PENYULUH
PERTANIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN,
PETANI BERPRESTASI, BALAI PENYULUHAN
KECAMATAN BERPRESTASI, DAN
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2024

NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN
BALAI PENYULUHAN KECAMATAN BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

No	Balai Penyuluhan Kecamatan	Nama	Alamat	Nilai
1	Teladan 1	BPP Kecamatan Lunang	Kab. Pesisir Selatan	870,50
2	Teladan 2	BPP Kecamatan Tiumang	Kab. Dharmasraya	801,00
3	Teladan 3	BPP Kecamatan Suliki	Kab. Lima Puluh Kota	665,50

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 521 - 596 - 2024
TANGGAL 16 Agustus 2024
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PENYULUH
PERTANIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN,
PETANI BERPRESTASI, BALAI PENYULUHAN
KECAMATAN BERPRESTASI, DAN
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2024

NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

No	Gapoktan	Nama	Alamat	Nilai
1	Teladan 1	CV. ALAM BERKAH.	Jorong Parak Tabu Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok	975,00
2	Teladan 2	KEP KARYA BERSAMA	Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya	932,50
3	Teladan 3	KEP SUPER GANEPO	Jorong Padang Kandi, Nagari Tujuh Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota	920,00



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PIAGAM PENYAHARAAN

Nomor : 521 - 596 - 2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
kami Gubernur Sumatera Barat, menyampaikan :

PENGHARGAAN

diberikan kepada

AFDIRON NOVINDRA, SP.

NIP. 198304272017061001

Penyuluh Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

sebagai :

**Penyuluh Pertanian PNS Berprestasi II
Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**

Dalam Rangka Peningkatan SDM Pertanian Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Kategori Penyuluh Pertanian PNS Berprestasi

Mudah - mudahan Allah Tuhan Yang Maha Esa, memberkahi Saudara
dan Kita semua, Amiin.



Padang, 16 Agustus 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

[Signature]
MAHYELDI



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 521 - 596 - 2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
kami Gubernur Sumatera Barat, menyampaikan :

PENGHARGAAN

diberikan kepada

BPP KECAMATAN LUNANG

Kabupaten Pesisir Selatan

sebagai :

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Berprestasi I Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dalam Rangka Peningkatan Peran BPP Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Kategori Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Berprestasi

Mudah - mudahan Allah Tuhan Yang Maha Esa, memberkahi Saudara
dan Kita semua, Amiin.

Padang, 16 Agustus 2024



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI







OPPO A95

NelviTapan | Kecamatan Padang Timur, Kota Padang



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Rasuna Said No. 68 Telp. 0751- 28077, 28060, Fax. 28060 Padang
Website: <http://disnak.sumbarprov.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 524.3/68 /Kpts/DPKH-SB/X/2024**

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMENANG KONTESTERNAK
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Membaca** : 1. dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
2. keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Kontes Ternak Tahun 2024;
3. keputusan Tim Juri Kontes Ternak Tahun 2024 tentang hasil penilaian kontes ternak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Kota Payakumbuh.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendapatkan Bibit Ternak Berkualitas, perlu melaksanakan Kontes Ternak Tingkat Sumatera Barat sebagai wahana penilaian keberhasilan para Peternak di Sumatera Barat;
b. Bahwa Kontes Ternak Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 merupakan rangkaian kegiatan untuk memotivasi Peternak untuk menghasilkan bibit ternak unggul menuju swasembada pangan khususnya daging;
c. Bahwa untuk menetapkan pemenang Kontes Ternak tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan pemenang kontes ternak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini;
e. Bahwa melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 Nomor Rekening 3.27.02.1.05.0004 telah dialokasikan dana untuk kegiatan Kontes Ternak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang Undang No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

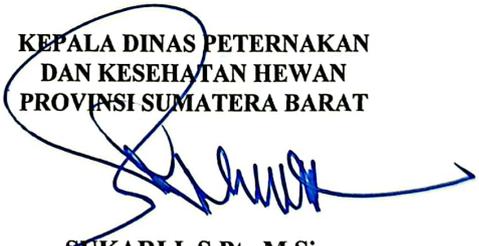
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Nasional;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor ; 20 Tahun 2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Perubahan APBD Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN PEMENANG KONTES TERNAK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pemenang Kontes Ternak Provinsi Sumatera Barat di Kota Payakumbuh tahun 2024 seperti tercantum pada Lampiran I;
- KEDUA : Keputusan Tim Juri Kontes Ternak bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan Kontes Ternak dalam rangka Menjaring Bibit Ternak Berkualitas Tingkat Sumatera Barat tahun 2024 ini dibebankan pada DPPA-OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Tahun 2024 Nomor Rekening 3.27.02.1.05.0004;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**


**SUKARLI, S.Pt., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721024 200003 1 002**

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
 - Cq. Kepala Biro Pembangunan
 - Cq. Kepala Biro Keuangan
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

Nomor : 524.3/08/Kpts/DPKH-SB/X/2024

Tanggal : 24 Oktober 2024

Tentang : Penetapan Pemenang Kontes Ternak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

1.SAPI PESISIR JANTAN

Peringkat	Asal Ternak	Score
Pertama	PAYAKUMBUH	78,73
Kedua	LIMA PULUH KOTA	77,12
Ketiga	PESISIR SELATAN	75,58

2.SAPI PESISIR BETINA

Peringkat	Asal Ternak	Score
Pertama	SIJUNJUNG	86,30
Kedua	LIMA PULUH KOTA	85,15
Ketiga	PESISIR SELATAN	83,71

3.SAPI BALI JANTAN

Peringkat	Asal Ternak	Score
Pertama	SIJUNJUNG	82,00
Kedua	PAYAKUMBUH	71,62
Ketiga	LIMA PULUH KOTA	70,89

4.SAPI BALI BETINA

Peringkat	Asal Ternak	Score
Pertama	SIJUNJUNG	89,25
Kedua	LIMA PULUH KOTA	83,30
Ketiga	PAYAKUMBUH	80,29

5.SAPI PO JANTAN

Peringkat	Asal Ternak	Score
Pertama	LIMA PULUH KOTA	81,37
Kedua	PAYAKUMBUH	76,98
Ketiga	TANAH DATAR	75,00

6.SAPI PO BETINA

Peringkat	Asal Ternak	Score
Pertama	PAYAKUMBUH	88,54
Kedua	AGAM	83,69
Ketiga	LIMA PULUH KOTA	81,85

7. SAPI SIMMENTAL JANTAN

Peringkat	Asal Ternak	Score
Pertama	LIMA PULUH KOTA	83,12
Kedua	PAYAKUMBUH	82,01

8. SAPI SIMMENTAL BETINA

Peringkat	Asal Ternak	Score
Pertama	PAYAKUMBUH	90,18
Kedua	LIMA PULUH KOTA	85,72

9. LIMOUSIN JANTAN

Peringkat	Asal Ternak	Score
Pertama	LIMA PULUH KOTA	80,65
Kedua	PAYAKUMBUH	77,64

10. LIMOUSIN BETINA

Peringkat	Asal Ternak	Score
Pertama	LIMA PULUH KOTA	87,73
Kedua	PAYAKUMBUH	86,50

11. KAMBING PERANAKAN ETAWA (PE) JANTAN

Peringkat	Asal Ternak	Score
Pertama	KOTA SOLOK	91,73
Kedua	BUKITTINGGI	90,54
Ketiga	DHARMASRAYA	85,29

12. KAMBING PERANAKAN ETAWA (PE) BETINA

Peringkat	Asal Ternak	Score
Pertama	KOTA BUKIT TINGGI	98,625
Kedua	DHARMASRAYA	97,82
Ketiga	PADANG PANJANG	95,84

13. KERBAU JANTAN

Peringkat	Asal Ternak	Score
Pertama	PAYAKUMBUH	80,50
Kedua	SAWAHLUNTO	79,14
Ketiga	SIJUNJUNG	76,64

14. KERBAU BETINA

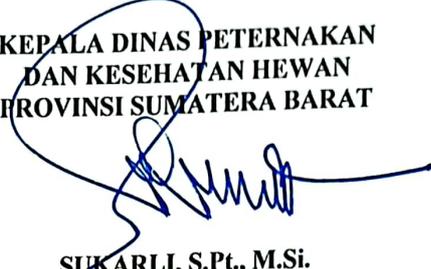
Peringkat	Asal Ternak	Score
Pertama	LIMA PULUH KOTA	89,10
Kedua	PESISIR SELATAN	86,75
Ketiga	PAYAKUMBUH	86,72

15. EKSTREM

Peringkat	Asal Ternak	Berat (Kg)
SAPI	LIMA PULUH KOTA	1.010
KERBAU	SAWAHLUNTO	760
KAMBING	KOTA SOLOK	109,5

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**SUKARLI, S.Pt., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721024 200003 1 002**



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

PIAGAM PENGHARGAAN

NO : 524.3 / 31 / DPKH-SB / X / 2024

DIBERIKAN KEPADA:

SYAMSURIJAL

SEBAGAI :

JUARA II

KERBAU BETINA

DALAM RANGKA KONTES TERNAK DAN LIVESTOCK EXPO TAHUN 2024



PAYAKUMBUH, 24 OKTOBER 2024

**RIH. GUBERNUR
SUMATERA BARAT**



ANDY JOINALDY



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

PIAGAM PENGHARGAAN

NO : 524.3 / 03 / DPKH-SB / X / 2024

DIBERIKAN KEPADA:

YUSRIAL

SEBAGAI :

JUARA III

SAPI PESISIR JANTAN

DALAM RANGKA KONTES TERNAK DAN LIVESTOCK EXPO TAHUN 2024

PAYAKUMBUH, 24 OKTOBER 2024
GUBERNUR
SUMATERA BARAT



AUDY JOINALDY



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

PIAGAM PENGHARGAAN

NO : 524.3 / 06 / DPKH-SB / X / 2024

DIBERIKAN KEPADA:

JAFRIAL

SEBAGAI:

JUARA III

SAPI PESISIR BETINA

DALAM RANGKA KONTES TERNAK DAN LIVESTOCK EXPO TAHUN 2024



PAYAKUMBUH, 24 OKTOBER 2024

**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**



ANDY JOINALDY





PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 500.12.18.1/206/KOMINFO-PS/2024

PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN DENGAN INI MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

DINAS PERTANIAN

Terbaik | Kategori Perangkat Daerah

KUALIFIKASI :

“ **Informatif** ”

DALAM MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TINGKAT KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN 2024

Palinan, 20 Desember 2024



Dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS DAERAH
Mansuri Pribadi



BUKA!
Informasi
Publik